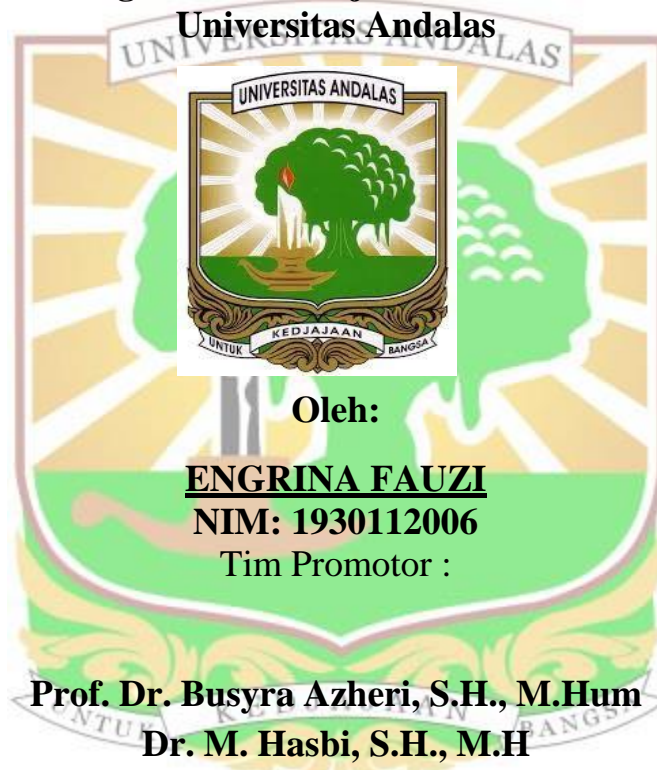


**PENGATURAN PENETAPAN SUKU BUNGA LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Oleh:

ENGRINA FAUZI

NIM: 1930112006

Tim Promotor :

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum

Dr. M. Hasbi, S.H., M.H

Dr. Nani Mulyati, S.H.,M.CL

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

PENGATURAN PENETAPAN SUKU BUNGA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Abstrak

Adanya kekosongan hukum mengenai penetapan suku bunga pinjaman pada Layananan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang terdapat pada POJK No. 77/01/2016 dan sebagaimana telah diubah pada POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. OJK memberikan kewenangan *Self Regulating Organization* (SRO) kepada AFPI untuk menetapkan suku bunga pinjaman. Demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka, diperlukan prinsip-prinsip penguatan tata kelola lembaga SRO dalam menjalankan operasional perusahaan dan aktifitas bisnis *fintech peer to peer lending*. Selain itu legalitas AFPI sebagai Lembaga SRO dan keabsahan kode etik/*code of conduct* AFPI dalam menetapkan suku bunga pinjaman menjadi hambatan dalam penguatan substansi dan kelembagaan industri *fintech peer to peer lending*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimanakah pengaturan penetapan suku bunga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kedua, Bagaimanakah kewenangan Asosiasi Fintech sebagai Lembaga SRO dalam menetapkan suku bunga pinjaman berbasis teknologi informasi di Indonesia. Ketiga, bagaimanakah pengaturan penetapan suku bunga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kedepan untuk menjamin kepastian hukum dalam meningkatkan perekonomian nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Pengaturan tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada asosiasi karena OJK sebagai wakil pemerintah mempunyai fungsi *approval agreement* dalam skala makro sesuai dengan tugas dan fungsi OJK selaku lembaga yang melaksanakan wewenang, memberikan aturan serta mengawasi perusahaan yang berbasis fintech, oleh karena itu pendelegasian kewenangan SRO dalam implementasinya diperlukan penguatan tata kelola prinsip-prinsip yang akan memperkuat AFPI sebagai lembaga SRO, prinsip tersebut antara lain, Flexibility, Independency, Non-diskrimination, Transparency, Empowerment, Community, Harmonization. Di samping itu, mengenai status kelembagaan AFPI, pengawasan dan penegakan hukum yang transparan akan sangat sukar dicapai karena AFPI bukanlah lembaga independen dalam menjalankan kebijakan SRO. Selain itu diatur juga secara komprehensif terkait Lembaga kredit skoring yang langsung berada dibawah OJK. Beberapa prospek untuk menentukan suku bunga pinjaman dengan cara *go public*, *credit scoring* dan *artificial intelligence*,

Kata kunci: *Fintech, Suku Bunga, Code of Conduct, Go Public, Artificial Intelligence*

INFORMATION TECHNOLOGY-BASED LENDING SERVICES INTEREST RATE DETERMINATION

Abstract

There is a legal vacuum regarding the determination of loan interest rates on Information Technology-Based Joint Funding Services contained in POJK No. 77/01/2016 and as amended in POJK No.10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. OJK gave the authority of the Self Regulating Organization (SRO) to AFPI to set loan interest rates. In order to realize social justice for all Indonesian people, it is necessary to have the principles of strengthening the governance of SRO institutions in carrying out company operations and peer to peer lending fintech business activities. In addition, the legality of AFPI as an SRO institution and the validity of the AFPI code of conduct in setting loan interest rates are obstacles in strengthening the substance and institutional structure of the peer to peer lending fintech industry. The formulation of the problem in this study is First, how is the setting of interest rates for lending and borrowing services based on information technology. Second, what is the authority of the Fintech Association as an SRO Institution in setting interest rates on information technology-based loans in Indonesia. Third, what are the arrangements for setting interest rates for information technology-based money lending services in the future to ensure legal certainty in improving the national economy. The method used is normative legal research using statutory, conceptual and comparative approaches. Arrangements cannot be fully given to associations because OJK as the representative of the government has an approval agreement function on a macro scale in accordance with the duties and functions of OJK as the institution that exercises authority, provides rules and oversees fintech-based companies. therefore the delegation of SRO authority in its implementation requires strengthening of governance principles that will strengthen AFPI as an SRO institution, these principles include Flexibility, Independence, Non-discrimination, Transparency, Empowerment, Community, Harmonization. In addition, regarding the institutional status of AFPI, transparent supervision and law enforcement will be very difficult to achieve because AFPI is not an independent institution in carrying out SRO policies. In addition, it is also comprehensively regulated related to credit scoring institutions that are directly under the OJK. Several prospects for determining loan interest rates by going public, credit scoring and artificial intelligence.

Keywords: SRO, Fintech, Interest Rates, Cartel, Code of Conduct.